

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKPA

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana masalah kesehatan menjadi perhatian penting. Kesehatan adalah salah satu kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melakukan pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pembangunan kesehatan tersebut dilakukan agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (DepKes RI, 2009).

Derajat kesehatan masyarakat akan tercapai dengan adanya upaya kesehatan. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah dalam rangka pembangunan nasional adalah dengan mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014, puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/Kota

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Puskesmas bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas sendiri mempunyai visi, yaitu tercapainya kecamatan sehat. Kecamatan sehat terdiri dari empat indikator utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan derajat kesehatan penduduk. Sehubungan dengan keinginan untuk mencapai visi, puskesmas menyelenggarakan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu termasuk pengelolaan obat yang baik. Pelayanan kefarmasian dapat berupa pengelolaan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat, dan pencatatan atau penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana, dan metode tatalaksana yang sesuai dan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Namun pelayanan kefarmasian kini telah berubah paradigma, yaitu dari orientasi pada obat menjadi orientasi pada pasien. Perubahan orientasi tersebut membuat apoteker atau asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dalam menjalankan tugasnya dapat berinteraksi secara

langsung dengan pasien serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Peran apoteker di puskesmas dalam pemberian informasi obat (PIO) dan pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat) sangat diperlukan. Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker membutuhkan bekal keterampilan dan pengalaman selama proses pembelajaran.

Untuk memperoleh pembekalan wawasan, keterampilan sekaligus pengalaman praktis dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di pemerintahan, salah satunya di puskesmas, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Program Studi Profesi Apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jagir sebagai hasil kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. PKPA diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2017 – 23 Juni 2017.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di puskesmas antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
6. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di puskesmas adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.